

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama perusahaan didirikan adalah untuk mencapai laba perusahaan yang diinginkan dan untuk memenuhi keinginan *shareholder* dalam mengembangkan perusahaan kearah yang lebih baik lagi. Kini anggapan tersebut telah berubah. Perusahaan tidak hanya memikirkan untuk mendapatkan laba saja (*single line*) tetapi perusahaan juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan disekitar perusahaan (*triple bottom line*) (Wulanda, 2017). Dalam kondisi saat ini melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sama pentingnya dengan perusahaan mengeluarkan laporan keuangan .

Para pemimpin perusahaan dunia semakin menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sekedar laporan keuangan) akan mendukung strategi perusahaan. Selain itu dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap *sustainable development* (Dilling, 2010). Para akuntan di Indonesia juga turut menyadari betapa pentingnya penyusunan *sustainability report*, karena didalamnya terdapat prinsip dan standar yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan tentu saja berbeda dengan laporan keuangan, serta juga dapat meningkatkan legitimasi perusahaan (Utari, 2014)

Kasus kasus kerusakan lingkungan yang muncul di Indonesia seperti kebakaran hutan masih sering terjadi. Laporan bersama yang diterbitkan oleh *Rainforest Action Network* (RAN), TuK Indonesia, Jikalahari, WALHI, dan Profundo menggarisbawahi peran penting sektor perbankan dalam melanggengkan krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Sebanyak 17 kelompok perusahaan yang diidentifikasi oleh pemerintah terlibat dalam kebakaran pada 2019 telah menerima setidaknya 19 miliar Dolar AS dalam bentuk pinjaman korporasi dan fasilitas pinjaman sejak tahun 2015. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bagaimana bank – bank dari Cina, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Jepang ikut mendanai aktivitas ilegal tersebut. Analisis yang dilakukan oleh *Rainforest Action Network* (RAN) juga mengungkapkan pembiayaan perusahaan yang bertanggungjawab terhadap krisis asap ini menjadi masalah lintas batas, karena sebagian besar pendanaan keuangan berasal dari bank – bank di ASEAN dan lembaga keuangan di Asia Timur, salah satunya bank di Indonesia (sumber : Laporan bersama yang diterbitkan *Rainforest Action Network* (RAN), TuK Indonesia, Jikalahari, WALHI, dan Profundo, 2019).

Saat ini peninjauan 5 kasus bank yang mendanai para nasabah yang beroperasi di industri kehutanan dan perkebunan perlu dilakukan dengan mengevaluasi laporan berkelanjutan bank (*sustainability report*) dan standar operasional nasabah serta mengungkapkan profil hubungan mereka dengan klien – klien bermasalah yang melanggar aturan LST. Lima kasus yang ditinjau adalah :

1. Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Group Korindo
2. Bank Central Asia (BCA) dengan Group Salim
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Group Sinar Mas
4. Bank Mandiri dengan Astra Agro Lestari
5. Maybank dengan Triputra

Sumber : (Laporan bersama yang diterbitkan *Rainforest Action Network* (RAN), TuK Indonesia, Jikalahari, WALHI, dan Profundo, 2019).

Dari uraian kasus diatas menjelaskan bahwa betapa pentingnya perusahaan menerapkan *good corporate governance*. Pramono dan Fakhruddin (2019) menilai bahwa *good corporate governance* dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Salah satu yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan publikasi *sustainability report*. Menurut Safitri dan Saifudin (2019) informasi mengenai dampak aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dapat diungkapkan melalui *sustainability report* sebagai laporan sukarela yang disajikan secara terpisah dari annual report agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar dan kasus tersebut tidak terjadi lagi.

Di Indonesia sendiri *sustainability report* sudah lama menjadi perbincangan. Untuk menekan jumlah angka perusahaan yang membuat *sustainability report* di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017. Dalam undang - undang

bagian BAB IV pasal 10 ayat 1 tersebut menyebutkan bahwa “LJK, Emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan (*Sustainability Reporting*)”. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan perusahaan dapat meningkatkan antusiasnya dalam membuat *sustainability report* demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Dalam undang undang tersebut menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Di Indonesia, *sustainability report* dilaporkan secara terpisah dari laporan keuangan tahunan. *Sustainability report* wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 april tahun berikutnya.

Ada beberapa pedoman yang menjadi standard pelaporan yang berlaku secara internasional dalam pembuatan *sustainability report* yaitu :

- a. *The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD Guidelines for Multinational Enterprises.*
- b. *The United Nations Global Compact (The Communication on Progress).*
- c. *Global Reporting Initiative (GRI)*
- d. *The International Organization for Standardization (ISO 26000, International Standard for Social Responsibility.*

(Sumber : Questribilia, 2020)

Dari pedoman standar pengungkapan *sustainability report* yang paling banyak digunakan adalah *Global Reporting Initiative* (GRI). Pada tahun 2016, standar baru diterbitkan oleh (*Global Sustainability Standards Board*) GSSB yaitu Standar GRI atau *GRI Standards*. Namun untuk penggunaan Standar GRI sendiri baru diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018 sehingga pada tahun 2016 dan tahun 2017 masih ada perusahaan yang menggunakan pedoman GRI-G4, dan ada juga beberapa perusahaan yang sudah mulai menggunakan Standar GRI. Dalam pedoman GRI-G4 maupun Standar GRI terbaru, pengungkapan *sustainability report* dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu kategori ekonomi, kategori lingkungan, dan kategori sosial. Pedoman GRI-G4 terdiri dari 91 item yang harus diungkapkan. Sedangkan dalam Standar GRI yang baru, jumlah item yang harus diungkapkan adalah 77 item. Meskipun lebih sedikit, Standar GRI mencakup konsep keseluruhan dari pedoman G4 yang disajikan dengan bahasa yang lebih jelas dan struktur baru yang sesuai dengan kebutuhan global.

Pengembangan model *sustainability report* dilakukan seiring dengan masih banyaknya respon negatif dan juga kritik dari berbagai kalangan terhadap kelemahan mendasar dari model pelaporan keuangan dan pelaporan manajemen (*Manajemen Reporting*) yang lebih menekankan pada aspek aspek dan indikator indikator kesuksesan perusahaan dari segi keuangan/ekonomi perusahaan saja, sedangkan aspek aspek dan indikator indikator kegagalan perusahaan dalam mengelola isu isu sosial dan lingkungan sering diabaikan dan tidak diungkapkan dalam bentuk pelaporan. Maka dari

itu pelaporan keuangan dan pelaporan manajemen diduga menjadi informasi yang menyesatkan ketika digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan juga bisa mengakibatkan krisis sosial dan lingkungan serta bisa berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkannya model pelaporan *sustainability report* yang akan menyajikan informasi mengenai ekonomi, lingkungan dan sosial. Salah satu tujuan dikembangkannya model *sustainability report* adalah untuk melanjutkan keberlanjutan bisnis perusahaan jangka panjang dan meningkatkan sistem tata kelola perusahaan menjadi lebih baik lagi.

Pengembangan model SR tersebut didasarkan pada teori *Triple Bottom Line of Business* (teori 3-P) dari John Elkington (1997). Menurut Elkington, apabila suatu korporasi ingin bisnisnya tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan maka korporasi itu harus peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam semesta (*planet*), masyarakat (*people*) dan pertumbuhan laba korporasi itu sendiri (*profits*). Ketiga P tersebut (3P) tersebut merupakan pilar dasar bisnis dari suatu korporasi.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung akan meningkatkan daya saing dengan perusahaan lainnya, dengan begitu perusahaan akan melakukan publikasi *sustainability report* sehingga *stakeholders* akan lebih percaya karena transparansi terhadap informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Suryono & Prastiwi (2011), Oktaviani (2019), Tobing, Zuhrotun, dan Ruserlistyani

(2019), dan Susanti dan Altiva (2019) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*.

Susanti dan Altiva (2019) menjelaskan bahwa Profitabilitas yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report* dapat disebabkan karena biasanya perusahaan dengan tingkat profitabilitas lebih tinggi dapat menyebabkan informasi yang diungkapkannya lebih banyak karena ingin menunjukkan kepada publik dan *stakeholders* bahwa perusahaannya dapat beroperasi dengan efisien sehingga menghasilkan keuntungan lebih besar. Kemudian dalam penelitian Dilling (2010) dan Jannah (2016) juga membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sementara itu dalam penelitian Aniktia dan Khafid (2015), Adhipradana & Dalnjono (2014), Safitri & Saifudin (2019) dan Indrianingsih & Agustina (2020) membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Sinaga & Fachturrozie (2017) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Menurut Sinaga & Fachturrozie (2017) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang menunjukkan bahwa Profitabilitas yang tinggi merupakan pencapaian suatu perusahaan. Perusahaan memiliki keunggulan dalam hal memperoleh profitabilitas sehingga perusahaan menginginkan pencapaian tersebut sebagai berita yang menyenangkan dan menjadi sorotan bagi *stakeholders* khususnya investor dan

kreditor. Dengan adanya informasi lain termasuk informasi pertanggungjawaban perusahaan dalam laporan keberlanjutan dapat mengcover pencapaian perusahaan dalam hal pencapaian profitabilitas yang tinggi. Informasi tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih ditekankan daripada profitabilitas perusahaan yang tinggi. Dengan adanya pengungkapan sosial perusahaan, maka akan menimbulkan potensi perubahan penilaian pemangku kepentingan pada perusahaan

Selain profitabilitas, likuiditas juga menjadi dasar informasi penting untuk melihat kondisi perusahaan. Karena dari informasi likuiditas ini dapat melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya saat jatuh tempo. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indrianingsih & Agustina (2020), Ruhana & Hidayah (2019), dan Jannah (2016) likuiditas membuktikan adanya pengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*.

Menurut Jannah (2016) Jika tingkat likuiditas perusahaan meningkat maka pengungkapan *sustainability report* juga akan meningkat. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi berarti menandakan kemampuan besar untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kondisi keuangan yang kuat akan mendorong perusahaan untuk mengungkap lebih banyak informasi sebagai instrumen untuk meyakinkan para *stakeholdernya*, yakni dengan mempublikasikan kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan melalui pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputro (2013) yang juga

membuktikan Likuiditas berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suryono & Prastiwi (2011), Adhipradana & Daljono (2014), Safitri & Saifudin (2019), dan Oktaviani (2019) membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Susanti & Altifa (2019) yang membuktikan likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Pelaporan *sustainability report* tentunya akan memerlukan biaya – biaya dalam pengungkapannya. Laba yang diperoleh perusahaan harus dikurangi biaya – biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aniktia & Khafid (2015) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Menurut Aniktia & Khafid (2015) menjelaskan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* (termasuk kreditor dan investor) melalui *sustainability report*.

Yi dan Yu (2010) menyatakan bahwa semakin banyak investor yang menjadikan laporan keberlanjutan sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Perhatian terhadap rasio utang perusahaan yang tinggi dapat dialihkan melalui *sustainability report*. Pengungkapan *sustainability report* dapat menjaga dukungan dan kepercayaan dari para kreditor. Informasi keberlanjutan dapat membantu pemberi pinjaman untuk menentukan faktor risiko yang terkait dengan praktek bisnis perusahaan (Yi

dan Yu, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Aniktia & Khafid (2015) tidak sejalan dengan penelitian Safitri dan Saifudin (2019), Oktaviani (2019), Tobing, Zuhrotun, dan Rusherlistyani (2019), Afsari, Purnamawati, dan Prayudi (2017), dan Indrianingsih & Agustina (2020) yang membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *sustainability report*. Penelitian dengan hasil berbeda yang dilakukan oleh Suryono & Prastiwi (2011) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap publikasi *sustainability report*.

Perusahaan yang besar tentunya memiliki tanggungjawab yang besar terhadap stakeholder. Sehingga perusahaan harus mengungkapkan informasi aktivitas perusahaan yang lebih luas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryono & Prastiwi (2011), Wulanda (2017), Tobing, Zuhrotun, dan Rusherlistyani (2019) dan Afsari, Purnamawati, dan Prayudi (2017) membuktikan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib berusaha memastikan bahwa perusahaan tetap beroperasi dalam batasan dan norma yang ada dalam masyarakat lingkungan di mana perusahaan beroperasi, di mana perusahaan berupaya untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan diterima oleh *stakeholder* sebagai suatu yang sah (Adhima, 2012).

Afsari, Purnamawati, dan Prayudi (2017) menjelaskan bahwa Perusahaan akan merasa keberadaan dan aktivitasnya mendapat pengakuan dari masyarakat atau lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi atau

dapat dikatakan terlegitimasi, apabila perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Semakin besar ukuran suatu perusahaan yang dilihat dari jumlah asset yang dimiliki perusahaan maka akan semakin besar tuntutan masyarakat kepada perusahaan tersebut karena semakin besar suatu perusahaan tentunya akan semakin banyak sumber daya yang dipergunakan. Sehingga masyarakat akan semakin menuntut adanya pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat maupun stakeholder lainnya.

Penelitian yang dilakukan dengan Afsari, Purnamawati, dan Prayudi (2017) sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Aziz (2014) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *pengungkapan sustainability report*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Saifudin (2019), Oktaviani (2019), Aliniar & Wahyuni (2017), Riza (2017) dan Dewi dan Pitriasari (2019) yang membuktikan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap publikasi *sustainability report*. Penelitian dengan hasil berbeda juga dilakukan oleh Susanti & Altiva (2019) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris menjadi sangat penting dan menjadi aspek penilaian seberapa efektif dewan komisaris dalam menjalankan perannya di perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009) membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan, karena keberadaan dewan

komisaris dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggungjawab sosial. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Saifudin (2019), Aliniar & Wahyuni (2017) dan Aziz (2014) yang telah membuktikan bahwa Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris akan dibantu oleh komite audit. Komunikasi yang terjalin antara komite audit dengan dewan komisaris menjadi tolak ukur seberapa baik komite audit dalam menjalankan perannya di perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suryono & Prastiwi (2011), Aniktia & Khafid (2015), Safitri & Saifudin (2019) yang telah membuktikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*.

Suryono & Prastiwi, (2011) menyatakan bahwa komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance* melalui jumlah pertemuan yang dilakukan. Hasil penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Atsari, Purnamawati, dan Prayudi (2017) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhipradana & Daljono (2014), Wulanda (2017), dan Dewi & Pitriasari (2019) yang membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh dengan

pengungkapan *sustainability report*. hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Hasanuddin & Suryani (2019) yang telah membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap publikasi *sustainability report*.

Perusahaan yang baik tentunya akan menerapkan (*good corporate governance*) salah satunya dengan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan. dan ini akan menjadi tanggung jawab pokok komisaris independen. Selain mendorong untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, komisaris independen juga harus memastikan informasi dan sistem perusahaan berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Aliniar & wahyuni (2017) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Marsono (2013) yang menentukan adanya pengaruh antara proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2014) dan Aniktia dan Khafid (2015) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengungkapan *sustainability report*. hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh Indrianingsih & Agustina (2020) yang membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap publikasi *sustainability report*.

Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Amanah (2019). Perbedaan antara penelitian ini dengan

penelitian oktaviani (2019) terletak pada pengukuran variabel independen, tahun penelitian, serta sumber data penelitian. Didalam penelitian oktaviani (2019) terdapat variable struktural modal, didalam penelitian ini tidak terdapat variable independen struktural modal. Penelitian ini tidak menggunakan variabel struktural modal karena dalam penelitian Oktaviani (2019) struktural modal tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Hal ini kemungkinan perusahaan dengan rasio hutang yang lebih besar dibandingkan dengan modal cenderung menghindari biaya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pengungkapan *sustainability report*.. Objek penelitian dari penelitian oktaviani (2019) menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2016, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016 – 2019.

B. Perumusan masalah

Didalam penelitian ini perumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report* ?
2. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap publikasi *sustainability report* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*?

5. Apakah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap publikasi *sustainability report*?
6. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap publikasi *sustainability report*?
7. Apakah komisaris independen berpengaruh positif terhadap *sustainability report* ?

C. Batasan masalah

Cakupan dalam penelitian ini terdiri dari variable independen dan variable dependen. Variable independen mencakup kinerja keuangan (dengan menggunakan pengukuran profitabilitas, likuiditas dan *leverage* dalam perusahaan), ukuran perusahaan, dewan komisaris, ukuran komite audit, dan komisaris independen. Variable dependen pada penelitian ini yaitu publikasi *sustainability report*. Studi kasus pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang sudah terdaftar di BEI tahun 2016 – 2019.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dewan komisaris, ukuran komite audit, dan komisaris independen terhadap publikasi *sustainability report*. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya yaitu :

1. Pihak akademisi

Memberikan informasi pemahaman yang berkaitan dengan *sustainability report* dan juga penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut terkait *sustainability report* di Indonesia.

2. Pihak perusahaan

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan semakin baik karena dengan mempublikasikan *sustainability report* akan menjadi informasi yang sangat penting bagi pihak terkait. Dan juga meningkatkan kepercayaan stakeholder kepada perusahaan.

3. Pemerintah

Untuk menjadi bahan pertimbangan kedepannya dalam membuat kebijakan *sustainability report*

